



Judul : DPR setuju tambahan biaya
Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 4

| IBADAH HAJI 2023 | **DPR Setujui Tambahan Biaya**

Bisnis, JAKARTA — Komisi VIII DPR menyetujui usulan pemerintah menambah biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp288,31 miliar untuk tambahan kuota haji reguler sebanyak 7.360 jemaah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menjelaskan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) itu telah disepakat Komisi VIII DPR.

“Komisi VIII DPR dapat menyetujui penambahan kuota haji reguler sebanyak 7.360 jemaah dan penambahan kuota haji khusus sebanyak 640 jemaah dan penggunaan nilai manfaatnya sebesar Rp288.312.382.288,42,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (23/5).

Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi menambah kuota haji sebanyak 8.000 jemaah

untuk Indonesia, dengan rincian haji reguler sebanyak 7.360 jemaah dan haji khusus sebanyak 640 jemaah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, usulan anggaran sebesar Rp288,31 miliar itu menggunakan asumsi kurs mata uang asing yang sama dengan pada saat penetapan BPIH 2023, yaitu Rp15.150 per dolar AS dan Rp4.040 per riyal Arab Saudi (SAR).

Frekuensi manasik di kabupaten/kota sebanyak dua kali dan manasik di tingkat KUA sebanyak tiga kali, dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang makin dekat dengan waktu pemberangkatan juga menjadi pertimbangan Kemenag dalam mengusulkan angka tersebut.

Selain menyetujui penggunaan nilai manfaat untuk kuota haji reguler, Komisi VIII DPR juga menyetujui

usulan Kemenag tertanggal 28 Maret 2023 atas selisih jumlah jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 dengan jumlah Rp232,91 miliar, akibat dari perbaikan dan penyesuaian data jemaah lunas tunda 2020 sebanyak 8.306 jemaah yang tercatat sebagai jemaah lunas tunda 2022.

“Dengan demikian, berakhir sudah rapat pada hari ini. Semoga ini adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan rida dari Allah dan sebagai upaya kita bagi kemaslahatan umat,” kata Ace.

Menurutnya, Komisi VIII DPR juga meminta pemerintah untuk mementingkan calon jemaah yang batal berangkat di tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19.

Ace menyampaikan banyak jemaah calon haji yang terpaksa menunda untuk menunaikan rukun islam yang kelima itu akibat adanya pandemi Covid-19. (Ni Luh Anggela)